

HAMBATAN YANG DIHADAPI GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENERAPKAN KURIKULUM 2013 DI SMP NEGERI SE-KABUPATEN LAMONGAN

Ahmad Dani Iswantoro

11040254225 (Prodi S1 PPKn, FIS, UNESA) dani_sanju@yahoo.co.id

Harmanto

0001047104(PPKn, FIS,UNESA) harmanto.unesa2005@gmail.com

Penelitian ini mengungkapkan tentang hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan. Subjek penelitian ini adalah guru PPKn di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan yang menjadi *Pilot Project* pengembangan kurikulum 2013. Pendekatan dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif presentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Hambatan yang dihadapi antara lain adalah mengembangkan silabus secara mandiri sebanyak 72,2% guru, mengembangkan RPP secara mandiri sebanyak 50% guru, menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah sebanyak 22,2% guru, mengembangkan indikator pencapaian pada setiap KD sebanyak 22,2% guru, menguasai berbagai macam model pembelajaran sebanyak 55,6% guru, melakukan penilaian afektif sebanyak 45,8% guru, melakukan penilaian psikomotor sebanyak 38,9% guru, memotivasi keaktifan siswa 44,4% guru, dan mengoperasikan media teknologi sebanyak 27,8% guru. 2) Upaya mengatasi hambatan kurikulum 2013 dengan melakukan diskusi dengan guru PPKn melalui MGMP, mengikuti seminar/ lokakarya mengenai kurikulum 2013, memanfaatkan silabus yang telah dibuat pemerintah, dan mempelajari serta memahami berbagai macam model pembelajaran.

Kata Kunci: Hambatan, Guru PPKn, Kurikulum 2013.

Abstract

This research reveals about the obstacles that is faced by civic education teachers in implementing the 2013 curriculum. The purpose of this research is analyzing the civic education teachers obstacles that is faced in implementing the 2013 curriculum in secondary schools throughout the Lamongan district. The subjects were secondary schools civic education teachers throughout the Lamongan district which is being a Pilot Project of 2013 curriculum implementation. The approach and design of this research is quantitative descriptive. Data collection method in this study was a questionnaire and interviews. Data analyzing techniques in this research is descriptive percentage. These results indicate that: 1) the Obstacle among others are developing independently syllabus as much as 72,2% of teachers, developing lesson plans independently as much as 50% of teachers, organizing learning activities using a scientific approach as much as 22,2% of teachers, developing indicators of achievement in each based competence as much as 22,2 % of teachers, mastering a variety of learning models as much as 55,6% of teachers, making an affective assessment as much as 45,8% of teachers, making a psychomotor assessment as much as 38,9% of teachers, motivating students activeness as much as 44,4% of teachers, and operating the technology media as much as 27.8% of teachers. 2) the efforts to overcome the 2013 curriculum obstacles by discussing with civic education teachers through MGMP, following the 2013 curriculum workshops, utilizing the syllabus that has been made by the government, and learning and understanding the wide variety of learning models.

Keyword: Obstacles, Civic Education Teacher, 2013 curriculum.

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia yang

menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperuntukan dirinya,

masyarakat, bangsa dan Negara (UU Sisdiknas No.20/ Tahun 2003).

Pendidikan merupakan salah satu investasi untuk meletakkan dasar bagi kejayaan bangsa pada masa depan. Pendidikan merupakan suatu tolak ukur yang tinggi pada peradaban dari suatu bangsa, karena dari system dan proses pendidikanlah maju mundurnya suatu bangsa dapat dinilai. Seringkali arti penting mengenai pendidikan pada penerapan sistem pendidikan di Indonesia cenderung masih mewakili budaya verbalisme yang menghasilkan lulusan kurang kreatif, inovatif, kurang memiliki tanggung jawab serta kurang mampu untuk mengantisipasi perubahan dunia yang begitu cepat.

Untuk menghasilkan lulusan berkualitas yang diharapkan sesuai dengan tujuan nasional maupun tujuan sekolah, maka setiap sistem pendidikan atau sekolah memerlukan kurikulum yang berfungsi sebagai alat untuk mencapainya. Menurut Mulyasa (2006: 46) kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai hasil kompetensi dasar dan tujuan pendidikan.

Kurikulum merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah karena kurikulum merupakan rancangan formal dan tertulis bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga pendidikan dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan teratur. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan sebab kurikulum berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menentukan kualifikasi suatu lembaga pendidikan.

Salah satu komponen penting dari Sistem Pendidikan Nasional adalah kurikulum karena kurikulum merupakan komponen pendidikan yang dijadikan acuan oleh setiap satuan pendidikan, baik oleh pengelola maupun penyelenggara khususnya guru. Faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kurikulum adalah tenaga kependidikan / guru. Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 1, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Keberhasilan dalam penerapan kurikulum bergantung pada kemampuan seorang guru, karena guru adalah perencana, pendidik, pengajar, pembimbing, dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru merupakan penerjemah kurikulum yang datang dari pusat. Gurulah yang mengolah dan meramu kembali kurikulum.

Sistem pendidikan nasional di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum yang terus menerus berganti menjadi fenomena yang memiliki dampak tersendiri dari berbagai pihak penyelenggara pendidikan di sekolah baik warga sekolah yaitu kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan peserta didik, maupun warga diluar sekolah yaitu orang tua, akademisi, dan pihak-pihak lain. Sebagai instrumen peningkatan mutu pendidikan, kurikulum selalu melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan melakukan perbaikan, pengembangan, dan pelengkap dari kurikulum terdahulu. Menurut Nasution (2009: 252) perubahan kurikulum mengenai tujuan maupun alat-alat atau cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada dasarnya mengubah kurikulum sama halnya mengubah manusia yang terlibat sebagai peragaan kurikulum. Oleh sebabnya perubahan kurikulum dianggap sebagai perubahan sosial (*Social Change*).

Kurikulum dibuat untuk memperlancar proses kegiatan belajar-mengajar di sekolah dengan tujuan memperbaiki mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Menurut UU no. 20 tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kemendikbud (2013: 80) Kurikulum adalah instrumen pendidikan untuk membawa insan Indonesia agar memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, kreatif, inovatif, dan afektif. Selanjutnya Hamalik (2002: 36) Kurikulum adalah rencana dasar komponen pendidikan yang disusun secara relevan atas dasar tujuan, program pendidikan, sistem penyampaian, dan evaluasi oleh sekolah dan guru yang mengajar.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah rencana instrumen pendidikan yang disusun dengan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara relevan dengan tujuan memperlancar proses kegiatan belajar - mengajar di kelas dalam lembaga pendidikan.

Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Perubahan dan pengembangan Kurikulum 2013 didorong oleh beberapa hasil survei Internasional tentang kemampuan peserta didik Indonesia dalam kancah Internasional. Dari hasil survei tersebut disimpulkan bahwa prestasi peserta didik Indonesia tertinggal dan terbelakang (Mulyasa, 2013:60).

Tujuan kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif inovatif, afektif, melalui sikap, ketrampilan dan pengetahuan yang terintegrasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam implementasi kurikulum guru dituntut professional merancang

pembelajaran yang efektif dan bermakna (menyenangkan), mengorganisasikan pembelajaran, memilih pendekatan pembelajaran yang tepat, menentukan prosedur pembelajaran dan pembentukan kompetensi secara efektif serta menetapkan kriteria keberhasilan (Loeloe:2013).

Implementasi Kurikulum 2013 merupakan aktualisasi kurikulum dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini guru harus menguasai prinsip-prinsip pembelajaran dalam hal memilih dan menggunakan media serta metode pembelajaran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan (Mulyasa, 2013:100).

Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar. Proses pembelajaran berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, peserta didik dituntut untuk dapat menguasai kompetensi yang mengacu pada kompetensi inti dan kompetensi dasar melalui kegiatan menanya, menalar, mencoba atau melakukan eksperimen, mengolah data, dan membuat simpulan. Pada akhirnya siswa diharapkan mengerti dan memahami tujuan pembelajaran tersebut dan menempatkan guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, dan mediator.

Adanya perubahan kurikulum, maka dalam penerapannya tentu akan mengalami suatu hambatan. Keberhasilan implementasi kurikulum ini juga dipengaruhi oleh kemampuan guru terutama berkaitan dengan pengetahuan dan kemampuan, serta tugas yang ia emban. Dari sekian banyak perubahan yang terjadi tentu saja ada "cacat" dalam pengimplementasian perubahan kurikulum tersebut, hal ini bisa saja karena kurangnya keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan guru dalam memahami tugas-tugas yang ia emban dan laksanakan (Kurinasih, 2014:6).

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III. George Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut diperlukan guna dapat mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu: (1) apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?, (2) Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?. Empat faktor menurut George

Edward III yang berperan penting dalam implementasi adalah Faktor *communication, resources, disposition*, dan *Bureaucratic structure*. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan?. 2) Upaya apa saja yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan penerapan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan?. Tujuannya untuk menganalisis hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan., serta Mendeskripsikan Upaya yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengatasi hambatan penerapan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif karena data penelitian berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan tertentu secara terperinci dan dianalisis secara statistik (Sugiyono, 2009:279). Pada penelitian deskriptif kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap angket bersifat tertutup dan terbuka. Kemudian data tersebut dikuantitatifkan atau diangkakan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis hambatan yang dihadapi guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menerapkan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan.

Tempat yang dijadikan penelitian adalah di Kabupaten Lamongan. Alasan untuk menentukan lokasi penelitian tersebut karena di kabupaten Lamongan terdapat 6 SMP Negeri yang ditunjuk oleh kemendikbud sebagai sekolah percontohan pelaksanaan Kurikulum 2013 yaitu SMP Negeri 1 Lamongan, SMP Negeri 2 Lamongan, SMP Negeri 1 Glagah, SMP Negeri 1 Turi, SMP Negeri 2 Mantup, dan SMP Negeri 2 Pucuk. Dengan demikian wilayah ini dianggap layak untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru PPKn di 6 SMP Negeri yang masih menerapkan kurikulum 2013 di Kabupaten Lamongan.

Tabel 3.2 Jumlah guru PPKn di 6 SMP Negeri yang masih menerapkan kurikulum 2013 di Kabupaten Lamongan

No	Sekolah	Jumlah guru PPKn
1	SMP N 1 Lamongan	4
2	SMP N 2 Lamongan	3
3	SMP N 1 Glagah	3
4	SMP N 1 Turi	3
5	SMP N 2 Mantup	2
6	SMP N 2 Pucuk	3
	JUMLAH	18

Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 18 guru PPKn di 6 SMP Negeri yang masih menerapkan kurikulum 2013 di Kabupaten Lamongan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah guru PPKn di SMP Negeri yang masih menerapkan kurikulum 2013 di Kabupaten Lamongan yaitu berjumlah 18 orang guru, sehingga sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh populasi. maka penelitian ini merupakan penelitian populasi yaitu mengambil seluruh populasi untuk dijadikan responden.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket dan wawancara. Metode angket dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup, karena responden memberikan pendapatnya dengan memilih pilihan jawaban pertanyaan yang telah disediakan. Angket digunakan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum 2013 meliputi hambatan perencanaan pembelajaran seperti mengembangkan silabus dan RPP, menentukan model pembelajaran yang sesuai, mengembangkan media pembelajaran, dan menyusun penilaian. Selain itu juga hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran seperti pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan RPP, penguasaan kelas, membuat siswa aktif, pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah, dan penguasaan IT. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari guru mengenai solusi atau upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan kurikulum 2013. Wawancara ini dilakukan secara acak kepada responden yang berjumlah 6 orang.

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif presentase. Analisis deskriptif presentase digunakan untuk mengetahui persentase tiap-tiap faktor berdasarkan skor jawaban responden dengan rumus:

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Jumlah Persentase (%)

n : Banyaknya jumlah pemilih

N : Jumlah sampel seluruhnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hambatan yang Dihadapi Guru PPKn dalam Menerapkan Kurikulum 2013

Pada awal tahun akademik 2013/2014, kementerian pendidikan dan kebudayaan Indonesia menerbitkan kurikulum pendidikan baru yang disebut Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 saat ini sedang diterapkan di sekolah-sekolah *piloting projects* di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam upaya implementasi kurikulum baru tersebut pemerintah melaksanakan berbagai persiapan antara lain sosialisai, pelatihan, seminar dan lokakarya bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan mereka dapat memahami dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan konsep dan strategi implementasi kurikulum baru tersebut. Namun demikian, kurikulum 2013 adalah kurikulum baru yang tentunya dalam penerapannya masih terdapat kendala dan kekurangan.

Dari hasil penelitian dengan menggunakan angket, diperoleh data mengenai tingkat hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Hambatan dalam Perencanaan Pembelajaran

Agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sistematis, diperlukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan pembelajaran tersebut meliputi penyusunan silabus dan RPP, menyusun kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, dan juga menentukan model pembelajaran yang akan digunakan. Akibat dari adanya perubahan kurikulum, maka aspek-aspek yang terkait dengan perencanaan pembelajaran juga mengalami perubahan sehingga guru harus menyesuaikannya dengan kurikulum yang baru dan guru mengalami hambatan dalam menerapkannya.

Tabel 4.4 Hambatan dalam perencanaan pembelajaran

No	Pernyataan/ pertanyaan	SS	S	M	SM
		%	%	%	%
1	Mengembangkan Silabus Secara Mandiri	11,1	61,1	27,8	0
2	Menyusun dan mengembangkan RPP secara mandiri	5,6	44,4	50	0
3	Menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah	0	22,2	77,8	0

No	Pernyataan/ pertanyaan	SS	S	M	SM
		%	%	%	%
	5M (Mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan)				
4	Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi pada setiap kompetensi dasar (KD)	11,1	11,1	61,1	16,7
5	Menentukan model pembelajaran manakah yang sesuai untuk digunakan dalam setiap pembelajaran	0	55,6	44,4	0

Sumber: data penelitian diolah

Keterangan:

SS : Sangat Sulit

M : Mudah

S : Sulit

SM : Sangat Mudah

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 4.4 pada item no.1 tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PPKn di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan yakni 61,1% mengalami kesulitan dalam mengembangkan silabus secara mandiri. Bahkan terdapat 11,1% guru PPKn sangat kesulitan dalam mengembangkan silabus secara mandiri, namun juga ada beberapa guru PPKn yang merasa mudah untuk mengembangkan silabus secara mandiri. Hal itu karena kemampuan guru yang beragam dalam membuat silabus. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk mengembangkan silabus secara mandiri diperlukan keahlian untuk mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, serta lingkungannya dan yang terpenting adalah kemauan guru tersebut untuk mengembangkan silabus secara mandiri.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 item no.2 tersebut dapat diketahui bahwa masih banyak guru PPKn yang mengalami kesulitan dalam pengembangan dan penyusunan RPP, khususnya pada penyusunan dan pengembangan RPP secara mandiri. Terdapat 44,4% guru PPKn yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan menyusun RPP secara mandiri, bahkan terdapat 5,6% guru PPKn yang menganggapnya sangat sulit. Hal ini karena perubahan kurikulum dari kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 sehingga komponen dalam RPP pun mengalami perubahan. Namun terdapat juga guru

PPKn yang menganggap penyusunan dan pengembangan RPP secara mandiri adalah hal yang mudah, yakni sebanyak 50% yang menyatakan hal tersebut. Jadi setengah dari jumlah guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri Se-Kabupaten Lamongan mengalami kesulitan dalam menyusun dan mengembangkan RPP secara mandiri, dan setengahnya lagi tidak mengalami hambatan tersebut.

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa perubahan kurikulum juga berdampak pada perubahan konsep-konsep yang ada di dalamnya. Salah satu perubahan yaitu pada bagian penyusunan RPP, yang mana telah mengalami perubahan pada kompetensi yang ingin dicapai. Pada kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP kompetensi yang ingin dicapai hanya terbatas pada kompetensi pengetahuan, namun setelah mengalami perubahan menjadi kurikulum 2013 kompetensi yang ingin dicapai menjadi pengetahuan, sikap, dan keterampilan sehingga banyak guru yang mengalami hambatan atau kesulitan dalam membuat dan mengembangkan RPP.

Dari tabel 4.4 item no.3 tersebut juga dapat diketahui bahwa kebanyakan guru PPKn tidak mengalami hambatan dalam Menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah 5M (Mengamati, Menanya, Mengumpulkan data, Mengasosiasi, dan Mengkomunikasikan), yakni sebanyak 77,8% guru PPKn yang menyatakan mudah. Hal tersebut karena guru sadar akan pentingnya pendekatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, sehingga mau mempelajari dan memahami pendekatan tersebut. Sebanyak 22,2% guru PPKn menganggap menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah 5M sulit dilakukan. Hal tersebut karena membutuhkan waktu yang cukup lama pada saat proses mengamati dan memerlukan kreatifitas guru untuk membuat sebuah kasus atau permasalahan yang bisa dihubungkan dengan materi. Jadi sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se Kabupaten Lamongan tidak mengalami hambatan dalam Menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah 5M dan menggolongkannya dalam kategori mudah.

Tabel 4.4 item no.4 juga dapat diketahui bahwa kebanyakan guru PPKn tidak mengalami hambatan dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi pada setiap Kompetensi Dasar (KD), yakni sebanyak 61,1% guru PPKn yang mengkategorikan mudah, bahkan terdapat 16,7% guru PPKn mengkategorikan sangat mudah. Hal tersebut karena guru sudah memahami dengan baik KD yang ingin dicapai sehingga mudah untuk merumuskan indikatornya. Meskipun kebanyakan

guru PPKn mengkategorikan mudah dalam mengembangkan indikator pencapaian kompetensi pada setiap KD, tetapi masih terdapat juga guru PPKn yang mengkategorikan hal tersebut sulit yakni sebanyak 11,1%, bahkan sebanyak 11,1% guru PPKn mengkategorikannya sangat sulit. Kesulitan tersebut karena guru belum memahami cara pengembangan indikator pencapaian kompetensi dengan baik.

Kebanyakan guru PPKn mengalami kesulitan pada sub indikator menyusun dan mengembangkan RPP secara mandiri, yakni 50%. Sedangkan pada sub indikator menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah 5M dan mengembangkan indikator pencapaian kompetensi pada setiap kompetensi dasar (KD) kebanyakan guru tidak mengalami kesulitan yakni masing-masing sebanyak 77,8% guru PPKn.

Berdasarkan pada tabel 4.4 item no.5 dapat diketahui bahwa sebanyak 55,6% guru PPKn mengalami kesulitan dalam menentukan model pembelajaran manakah yang sesuai. Hal ini karena pemahaman guru PPKn tentang berbagai macam model pembelajaran masih kurang, sehingga untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai digunakan dalam penyampaian materi dirasa sulit bagi guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan. Tidak jarang model pembelajaran yang digunakan relatif monoton dan kurang beragam. Padahal terdapat berbagai macam model pembelajaran yang ada misalnya *Problem Based Learning*, *Project Based Learning*, *Inquiry*, *Discovery Learning*, *Cooperative Learning*, dll.

Jadi, sebelum menentukan model pembelajaran manakah yang sesuai untuk digunakan dalam setiap pembelajaran, terlebih dahulu guru harus memahami dengan baik berbagai macam model pembelajaran dan langkah-langkah penerapannya, sehingga nantinya guru dapat menentukan model manakah yang tepat untuk digunakan pada setiap pembelajaran dan mempermudah peserta didik dalam memahami dan menyerap materi.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembelajaran

Kurikulum merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah karena kurikulum merupakan rancangan formal dan tertulis bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah, sehingga pendidikan dapat berjalan secara terencana, sistematis, dan teratur. Kurikulum merupakan bagian penting dalam pendidikan sebab kurikulum berkaitan dengan penentuan arah, isi, dan proses pembelajaran yang pada akhirnya akan menentukan kualifikasi suatu lembaga pendidikan.

Adanya perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013 berdampak pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang mana pada KTSP peran guru di dalam kelas sangat dominan dibandingkan dengan siswa.

Namun pada kurikulum 2013 peran guru dikurangi sehingga siswa lebih berperan aktif di dalam kelas dan guru sebagai fasilitator. Akibat dari perubahan kurikulum, guru harus menguasai aspek-aspek yang terdapat dalam kurikulum baru tersebut, namun guru masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran.

Tabel 4.5 Hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran

No	Pernyataan/ pertanyaan	SS	S	M	SM
		%	%	%	%
1	Melakukan penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui Observasi	0	5,5	77,8	16,7
2	Melakukan penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui penilaian diri	0	16,7	61,1	22,2
3	Melakukan penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui penilaian antar teman	0	16,7	77,8	5,5
4	Melakukan penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui jurnal	5,6	22,2	72,2	0
5	Melakukan penilaian kognitif (pengetahuan) terhadap peserta didik melalui tes tulis	0	0	83,3	16,7
6	Melakukan penilaian kognitif (pengetahuan) terhadap peserta didik melalui tes lisan	0	0	77,8	22,2
7	Melakukan penilaian kognitif (pengetahuan) terhadap peserta didik melalui penugasan	0	0	72,2	27,8

No	Pernyataan/ pertanyaan	SS	S	M	SM
		%	%	%	%
8	Melakukan penilaian psikomotor (keterampilan) terhadap peserta didik melalui penilaian kinerja	0	33,3	66,7	0
9	Melakukan penilaian psikomotor (keterampilan) terhadap peserta didik melalui penilaian proyek	5,6	50	44,4	0
10	Melakukan penilaian psikomotor (keterampilan) terhadap peserta didik melalui portofolio	0	27,8	61,1	11,1
11	Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPP	5,6	11,1	66,7	16,6
12	Menggunakan model pembelajaran <i>Problem Based Learning</i> dalam kegiatan pembelajaran	0	16,7	83,3	0
13	Menggunakan model pembelajaran <i>Project Based Learning</i> dalam kegiatan pembelajaran	0	55,6	44,4	0
14	Menggunakan model pembelajaran <i>Discovery Learning</i> dalam kegiatan pembelajaran	5,6	22,2	72,2	0
15	Menggunakan model pembelajaran <i>Cooperative learning</i> dalam kegiatan	5,5	11,1	66,7	16,7

No	Pernyataan/ pertanyaan	SS	S	M	SM
		%	%	%	%
	pembelajaran				
16	Mengubah kebiasaan siswa pasif yang hanya mendengarkan penjelasan guru menjadi siswa yang kritis dan aktif dalam menanggapi pernyataan /pertanyaan dari guru	11,1	33,3	44,5	11,1
17	Mengkondisikan peserta didik agar tetap teratur dalam mengikuti pembelajaran di kelas	0	16,7	83,3	0
18	Menghubungkan materi pelajaran PPKn dengan pelajaran lain yang relevan	0	0	100	0
19	Mengoprasikan media teknologi seperti laptop, jaringan internet dan LCD dalam proses pembelajaran	11,1	16,7	50	22,2
20	Membuat dan melaksanakan remedial dan pengayaan	0	0	100	0

Sumber: data penelitian diolah

Keterangan:

SS : Sangat Sulit

M : Mudah

S : Sulit

SM : Sangat Mudah

Dari tabel 4.5 item no.1 tersebut dapat diketahui bahwa pada penilaian afektif (sikap) kebanyakan guru PPKn tidak mengalami kesulitan. Sebanyak 77,8% guru PPKn mengkategorikan mudah pada aspek penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui Observasi, bahkan sebanyak 16,7% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Hal ini karena penilaian observasi dilakukan secara berkesinambungan atau berkelanjutan yang dilakukan setiap hari baik langsung maupun tidak langsung. Namun masih terdapat 5,5% guru mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui

observasi. Hal ini karena memerlukan waktu yang lama dalam penilaian dan sulit untuk menentukan instrumennya. Tetapi secara keseluruhan tidak terdapat kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui observasi.

Pada tabel 4.5 item no.2 juga dapat diketahui sebanyak 61,1% guru PPKn mengkategorikan penilaian afektif melalui penilaian diri dalam kategori Mudah, dan bahkan sebanyak 22,2% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui penilaian diri, sebab peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri sehingga tidak menyita waktu guru. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa guru yang mengalami hambatan untuk melakukan penilaian afektif melalui penilaian diri, yakni sebanyak 16,7%. Hal ini karena guru kesulitan untuk menentukan instrumennya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui penilaian diri tetapi masih terdapat beberapa guru yang mengalami kesulitan.

Pada tabel 4.5 item no.3 pertanyaan “melakukan penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui penilaian antar teman”, dapat diketahui bahwa 77,8% guru PPKn mengkategorikannya mudah, dan 5,5% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Hal ini karena siswa sendiri yang akan melakukan penilaian terhadap temannya sehingga tidak menyita waktu guru. Namun masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui penilaian antar teman, yakni sebanyak 16,7% guru PPKn. Hal ini karena guru kesulitan untuk menentukan instrument penilaian yang tepat agar tidak menimbulkan penilaian yang subyektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebanyakan guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui penilaian antar teman tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami kesulitan.

Pada tabel 4.5 item no.4 pertanyaan “melakukan penilaian afektif (sikap) terhadap peserta didik melalui jurnal”, dapat diketahui bahwa sebanyak 72,2% guru PPKn mengkategorikannya mudah. Hal ini karena guru sudah memahami dengan baik penilaian afektif yang diperoleh dari sosialisasi dan seminar mengenai kurikulum 2013. Namun sedikit berbeda dengan penilaian afektif yang lain, pada penilaian afektif melalui jurnal ini guru PPKn lebih banyak mengalami kesulitan yakni sebanyak 22,2%, bahkan terdapat 5,6% guru PPKn yang mengkategorikan sangat sulit. Hal tersebut karena guru kesulitan untuk menentukan instrumennya dan pada penilaian melalui jurnal ini membutuhkan waktu yang

panjang dan lama karena sifatnya berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian afektif melalui jurnal, tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami kesulitan. Jadi, meskipun kebanyakan guru tidak mengalami hambatan pada penilaian afektif atau sikap, tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami hambatan dalam penerapannya. Hal tersebut karena penilaian afektif memiliki banyak aspek yang harus dinilai sehingga membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk diselesaikan.

Dari tabel 4.5 pada penilaian kognitif, dapat diketahui bahwa seluruh guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami hambatan dalam melakukan penilaian kognitif. Hal ini karena penilaian kognitif selalu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik pada kurikulum 2013 ini maupun kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada item no.5 penilaian kognitif melalui tes tulis sebanyak 83,3% guru PPKn mengkategorikannya mudah, dan 16,7% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Kemudian pada item no.6 penilaian kognitif melalui tes lisan, sebanyak 77,8% guru PPKn mengkategorikannya mudah dan 22,2% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Selanjutnya pada item no.7 penilaian kognitif melalui penugasan, sebanyak 72,2% guru PPKn mengkategorikannya mudah, dan 27,8% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semua guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian kognitif.

Pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa pada item no.8 pertanyaan “Melakukan penilaian psikomotor (keterampilan) terhadap peserta didik melalui penilaian kinerja” sebanyak 66,7% guru PPKn mengkategorikannya mudah karena guru dapat secara langsung mengukur keterampilan-keterampilan dari peserta didik. Meskipun demikian sebanyak 33,3% guru PPKn mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian psikomotor melalui penilaian kinerja. Hal ini karena membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan penilaian.

Pada item no.9 pertanyaan “Melakukan penilaian psikomotor (keterampilan) terhadap peserta didik melalui penilaian proyek” sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan mengkategorikannya pada kategori sulit yakni sebanyak 50% guru PPKn, dan bahkan 5,6% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori sangat sulit. Hal ini karena penilaian proyek memerlukan waktu lama yang harus diselesaikan dan pemahaman yang kurang

mengenai penilaian autentik, khususnya penilaian proyek. Hanya 44,4% guru PPKn yang mengkategorikannya mudah karena sudah mendapatkan pengarahan dan pelatihan mengenai penilaian autentik, sehingga mampu melakukan penilaian proyek dengan mudah.

Pada item no.10 pertanyaan “Melakukan penilaian psikomotor (keterampilan) terhadap peserta didik melalui portofolio” dapat diketahui bahwa sebanyak 61,1% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori mudah, dan sebanyak 11,1% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori sangat mudah. Meskipun sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam menerapkannya, tetapi masih terdapat beberapa guru yang mengalami kesulitan, yakni sebanyak 27,8% guru PPKn. Jadi, dalam penilaian psikomotor terdapat beberapa guru yang masih mengalami kesulitan dalam penerapannya. Hal ini karena pemahaman mengenai penilaian kurikulum yang masih kurang dan membingungkan karena banyak aspek yang harus dinilai dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Pada tabel 4.5 item no.11 dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPP. Sebanyak 66,7% guru PPKn mengkategorikannya dalam kategori mudah, dan bahkan sebanyak 16,6% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah. Hal ini karena alokasi waktu mengajar sudah disesuaikan dengan jam mengajar yang telah disediakan pada setiap mata pelajaran yang sudah dijadwalkan. Namun beberapa guru PPKn mengalami kesulitan pada saat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang telah direncanakan sebelumnya dalam RPP, yakni sebanyak 11,1% guru mengkategorikannya sulit, dan sebanyak 5,6% guru PPKn mengkategorikannya sangat sulit. Kesulitan guru PPKn dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP didasari oleh beberapa alasan, di antaranya adalah terdapat keperluan lain seperti rapat dadakan atau kedatangan tamu sehingga menyita banyak waktu mengajar bapak ibu guru di kelas.

Pada tabel 4.5 item no.12 dapat diketahui pada item pertanyaan “Menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam kegiatan pembelajaran”, sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Sebanyak 83,3% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori mudah karena pada dasarnya model pembelajaran ini menuntut siswa yang lebih aktif dari pada guru, dan guru hanya sebagai fasilitator. Meskipun demikian masih terdapat beberapa guru yang menganggap penggunaan model pembelajaran *Problem Based Learning* dalam kegiatan pembelajaran

sulit, yakni sebanyak 16,7% guru PPKn. Hal ini karena guru kurang memahami langkah-langkah dalam menerapkan model tersebut. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa meskipun sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran *Problem Based Learning*, tetapi masih terdapat beberapa guru yang mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Ini bisa saja terjadi karena seorang guru kurang menguasai dan memahami berbagai macam model pembelajaran yang ada, sehingga dalam penerapannya pada kegiatan pembelajaran sangat sulit.

Pada item no.13 pertanyaan “Menggunakan model pembelajaran *Project Based Learning* dalam kegiatan pembelajaran”, sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran tersebut. Yakni sebanyak 55,6% guru PPKn yang mengkategorikannya pada kategori sulit. Hal ini karena guru kurang memahami berbagai macam model pembelajaran, salah satunya adalah model pembelajaran PBL. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa guru yang tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran *Project Based Learning*, yakni sebanyak 44,4% guru PPKn. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penguasaan guru PPKn mengenai berbagai model pembelajaran berbeda-beda, ada yang menguasai dan mudah menggunakan berbagai macam model pembelajaran dan ada juga yang kesulitan menggunakan berbagai macam model pembelajaran.

Pada item no.14 pertanyaan “Menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning* dalam kegiatan pembelajaran”, dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran tersebut. yakni sebanyak 72,2% guru PPKn yang mengkategorikannya pada kategori mudah karena siswa dituntut lebih aktif di kelas, dan peran guru disini sebagai fasilitator yang membimbing dan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Meskipun sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan, tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami kesulitan, yakni sebanyak 22,2% guru PPKn yang mengkategorikannya sulit dan 5,6% guru PPKn yang mengkategorikannya sangat sulit. hal ini karena kemampuan guru dalam memahami dan menguasai berbagai macam model pembelajaran berbeda-beda, ada yang memahami berbagai macam model dan ada juga yang hanya mengetahui berbagai model pembelajaran tetapi kurang memahami dan menguasainya.

Pada item no.15 pertanyaan “Menggunakan model pembelajaran *Cooperative learning* dalam kegiatan

pembelajaran”, sebanyak 66,7% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori mudah, dan 16,7% guru PPKn mengkategorikannya sangat mudah karena siswa cukup dibagi menjadi beberapa kelompok dan kemudian diberikan sebuah permasalahan untuk didiskusikan. Jadi kebanyakan guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan model pembelajaran tersebut. Meskipun kebanyakan guru PPKn tidak mengalami kesulitan, tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami kesulitan. Yakni sebanyak 11,1% guru PPKn yang mengkategorikannya sulit dan 5,5% guru PPKn yang mengkategorikannya sangat sulit. Hal ini karena guru kurang memahami langkah-langkah dalam melakukan model pembelajaran *Cooperative learning*.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penerapan berbagai macam model pembelajaran, kebanyakan guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam menerapkannya, hanya saja pada model pembelajaran *Project Based Learning*, banyak guru PPKn yang mengalami kesulitan dalam menerapkannya, dan pada model pembelajaran yang lain juga masih ada beberapa guru yang mengalami kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penguasaan guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan mengenai berbagai model pembelajaran berbeda-beda. Ada yang memahami berbagai macam model pembelajaran dengan baik sehingga pada saat proses pembelajaran guru tersebut bisa lebih bervariasi dalam menggunakan berbagai macam model pembelajaran sehingga tidak menimbulkan kesan monoton dan membosankan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ada juga guru yang kurang menguasai dan memahami berbagai macam model pembelajaran, sehingga pembelajarannya terkesan monoton. Selama ini mata pelajaran PPKn dianggap pembelajaran yang monoton dan peserta didiknya hanya mendengarkan ceramah dari guru, maka dari itu guru PPKn harus menguasai berbagai macam model pembelajaran sehingga dapat menghapus kesan monoton pada mata pelajaran PPKn.

Dari tabel 4.5 item no.16 mengenai memotivasi keaktifan siswa dapat diketahui bahwa persentasi antara guru PPKn yang mengalami kesulitan dengan guru PPKn yang tidak mengalami kesulitan tidak jauh berbeda. Terdapat 33,3% guru PPKn yang mengkategorikan sulit, dan 11,1% guru PPKn mengkategorikan sangat sulit karena dalam diri siswanya sendiri tidak ada kemauan untuk aktif dan cenderung susah diatur apalagi untuk siswa kelas 7. Kemudian terdapat guru PPKn yang tidak mengalami kesulitan dalam memotivasi siswa untuk aktif, masing-masing 44,5% guru PPKn yang mengkategorikan mudah, dan 11,1% guru PPKn yang

mengkategorikan sangat mudah karena untuk membuat siswa aktif bisa dengan menggunakan berbagai model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Hal ini menunjukkan masih banyak guru PPKn yang kesulitan untuk memotivasi siswa supaya lebih aktif di kelas, apalagi untuk siswa yang baru beralih jenjang dari SD ke SMP yakni kelas 7. Meskipun demikian, masih terdapat guru yang merasa mudah untuk memotivasi siswa agar aktif di kelas, dengan menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran dan menumbuhkan sikap kritis dalam diri siswa tersebut. Jadi, untuk bisa menumbuhkan sikap aktif siswa di kelas dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran yang menuntuk siswa lebih aktif di kelas dari pada guru, sehingga siswa tersebut terbiasa untuk mengemukakan pendapatnya dan berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.

Pada tabel 4.5 item no.17 mengenai penguasaan kelas oleh guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan, dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan. Sebanyak 83,3% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori mudah karena sebuah keharusan seorang guru itu harus dapat menguasai kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Meskipun sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan, tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang mengalami kesulitan yakni sebanyak 16,7% guru PPKn yang mengkategorikannya pada kategori sulit karena tergantung dari siswanya yang mudah untuk diatur ataukah susah untuk diatur. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat menguasai kelas dibutuhkan keterampilan dan kemampuan seorang guru dalam membuat suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa mudah untuk diatur dan dikondisikan.

Dari tabel 4.5 item no.18 dapat diketahui bahwa semua guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam menghubungkan materi pelajaran PPKn dengan pelajaran lain yang relevan. Sebanyak 100% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori mudah. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk menghubungkan materi pelajaran PPKn dengan pelajaran lain yang relevan itu mudah, karena pada dasarnya antar konsep keilmuan itu saling berhubungan satu sama lain.

Dari tabel 4.5 item no.19 dapat diketahui bahwa sebagian besar guru PPKn tidak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan media teknologi seperti laptop, jaringan internet dan LCD dalam proses pembelajaran. Sebanyak 50% guru PPKn mengkategorikannya mudah dan sebanyak 22,2% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori sangat mudah karena media elektronik

tersebut sudah tersedia di sekolah sehingga bisa dipelajari cara pemakaiannya. Meskipun kebanyakan guru PPKn sudah mahir dalam mengoperasikan media teknologi, tetapi masih terdapat beberapa guru PPKn yang masih kesulitan untuk mengoperasikannya. Terdapat sebanyak 16,7% guru PPKn yang mengkategorikannya pada kategori sulit dan sebanyak 11,1% guru PPKn mengkategorikan sangat sulit. Hal ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana yang ada di sekolah. Apabila di sekolah sudah disediakan laptop atau komputer, LCD, jaringan Internet dan media teknologi yang lain, guru yang belum bisa mengoperasikan bisa belajar untuk mengoperasikan media teknologi yang sudah tersedia di sekolah dan memanfaatkannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, meskipun sebagian besar guru PPKn tidak mengalami hambatan atau kesulitan dalam mengoperasikan media teknologi sebagai alat bantu kegiatan pembelajaran tetapi masih terdapat beberapa guru yang mengalami kesulitan. Hal tersebut karena terbatasnya sarana pendidikan seperti media teknologi LCD atau proyektor, laptop atau computer, dan jaringan internet sehingga menghambat perkembangan guru dalam hal penguasaan media teknologi.

tabel 4.5 item no.20 tersebut dapat diketahui bahwa semua guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan tidak mengalami kesulitan dalam membuat dan melaksanakan remedial dan pengayaan. Hal ini terbukti bahwa 100% guru PPKn mengkategorikannya pada kategori mudah. Remedial dan pengayaan mutlak dilakukan oleh guru untuk membantu peserta didik yang masih kurang mampu memahami materi dengan baik. Dengan dilakukan remedial maka siswa yang belum memenuhi SKL maka diharapkan akan dapat memenuhi SKL tersebut dan tujuan pembelajaran akan tercapai.

Upaya yang Dilakukan Guru PPKn dalam Mengatasi Hambatan Penerapan Kurikulum 2013 di SMP Negeri Se-Kabupaten Lamongan

Kurikulum di Indonesia ini telah beberapa kali mengalami perubahan, hal ini karena kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Kurikulum selalu melakukan perubahan-perubahan yang bertujuan untuk melakukan perbaikan, pengembangan, dan pelengkap dari kurikulum terdahulu. Dalam perubahan kurikulum tentunya terdapat hambatan dalam penerapannya, khususnya pada kurikulum 2013 yang menggantikan KTSP. Hambatannya meliputi guru kesulitan untuk merancang perangkat pembelajaran secara mandiri, penguasaan dan pemahaman tentang berbagai macam model pembelajaran yang kurang, penyusunan penilaian autentik, kurang tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran, dll.

Adanya berbagai macam hambatan dalam penerapan kurikulum 2013 diperlukan upaya dari guru untuk bisa mengatasi hal tersebut. Salah satu hambatan guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan dalam penerapan kurikulum 2013 adalah kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan kemendikbud kepada guru mengenai penerapan kurikulum 2013. Hanya beberapa guru saja yang mendapatkan sosialisasi dan yang lainnya hanya mendapatkan pendampingan dari guru yang telah mengikuti sosialisasi. Penjelasan mengenai kurikulum 2013 berbeda-beda setiap pendamping, sehingga menimbulkan kebingungan. Apalagi pendamping yang belum memahami dengan baik kurikulum 2013. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Yulianto sebagai berikut:

“... sosialisasi mengenai kurikulum 2013 sudah beberapa kali dilakukan. Tetapi tidak semua guru mendapatkan sosialisasi dan pelatihan langsung. Beberapa guru yang lain mendapatkan pendampingan dari guru yang telah mendapatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai kurikulum 2013. Penjelasan mengenai kurikulum 2013 berbeda-beda setiap pendampingnya, sehingga terkadang kita bingung mana yang benar. Jadi untuk mengatasinya adalah dengan cara berdiskusi dengan guru-guru yang sudah beberapa kali mendapatkan sosialisasi mengenai kurikulum 2013 dan juga mencari informasi serta panduan dalam penerapan kurikulum 2013”(wawancara, 6 April 2015).

Jadi untuk mengatasi kebingungan mengenai kurikulum 2013 akibat kurang meratanya sosialisasi mengenai kurikulum 2013 yaitu dengan melakukan diskusi/sharing dengan guru-guru yang sudah beberapa kali mendapatkan pelatihan dan sosialisasi mengenai kurikulum 2013 sehingga mendapatkan kejelasan dalam menerapkan kurikulum 2013. Selain itu, perlu adanya kemauan untuk mencari informasi dan pengetahuan mengenai kurikulum 2013 dari beberapa referensi.

Hambatan lain dalam penerapan kurikulum 2013 adalah kesulitan dalam membuat dan mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri. solusi dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan memanfaatkan silabus yang sudah dibuat oleh kemendikbud dan juga melakukan diskusi antar guru melalui forum MGMP. Menurut bapak Sukardi:

“... Kalau mengembangkan silabus secara mandiri saya rasa sulit, tidak jarang bapak ibu guru sering copy paste silabus teman guru yang lain, dan juga ada yang download dari internet sehingga sumber silabus tersebut berbeda-beda. Namun pada kurikulum 2013

ini silabus telah dibuat oleh kemendikbud tinggal kita gunakan saja sebagai acuan untuk menyusun RPP.”(wawancara, 13 April 2015).

Selain itu, bapak Sukardi juga berpendapat:

“...Untuk mengatasi kesulitan mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri, kita melakukan diskusi/sharing dengan guru PPKn yang lain melalui forum MGMP PPKn. Dalam forum tersebut kita bisa saling berdiskusi mengenai cara menyusun perangkat yang baik dan benar, mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami dalam kurikulum 2013 dan lain-lain.”(wawancara, 6 April 2015)

Jadi, solusi untuk mengatasi hambatan dalam penyusunan silabus dan RPP secara mandiri adalah dengan memanfaatkan silabus yang sudah dibuat oleh kemendikbud dan juga melakukan diskusi dengan guru PPKn yang lain melalui forum MGMP, sehingga apabila ada hal-hal yang masih belum di pahami tentang perangkat pembelajaran yang baru, bisa didiskusikan dalam forum tersebut.

Hambatan dalam penerapan kurikulum 2013 yang lain adalah penguasaan dan pemahaman mengenai berbagai macam model pembelajaran. Menurut ibu Yayuk Karsiyah :

“... Untuk memahami dan menguasai berbagai macam model pembelajaran itu susah, ya minimal kita bisa memahami beberapa model pembelajaran. Apalagi dalam model pembelajaran pada kurikulum 2013 ini yang banyak macamannya.”(wawancara, 14 April 2015).

Solusi yang dilakukan oleh ibu Yayuk Karsiyah, adalah dengan memahami dan menguasai betul beberapa model pembelajaran, tidak harus semua model pembelajaran dipahami tetapi tidak menguasainya dengan baik. Cukup beberapa model yang sesuai dengan perkembangan pola berfikir peserta didik.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh bapak Yulianto sebagai berikut:

“... Kita memilih model pembelajaran mana saja yang sesuai dengan pola berfikir peserta didik. Tidak harus menguasai semua model pembelajaran yang ada. Tetapi beberapa model pembelajaran yang benar-benar kita pahami dan kuasai, yang terpenting model pembelajaran tersebut dapat membuat peserta didik lebih aktif dan memahami materi pembelajaran.” (wawancara, 6 April 2015).

Hambatan yang lain dalam penerapan kurikulum 2013 adalah melakukan penilaian autentik. Penilaian autentik adalah penilaian pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam melakukan penilaian adalah system penilaian yang memiliki terlalu banyak aspek. Menurut bapak Sukardi:

“... dalam satu kegiatan, masing-masing anak harus dinilai secara rinci meliputi berbagai macam aspek penilaian. Bayangkan kalau di kelas ada 30 murid, Waktu guru hanya akan habis untuk mengamati anak dan menilai aspek-aspek itu. Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah tidak semua penilaian dilakukan, khususnya penilaian sikap, hanya beberapa sikap saja yang dinilai tetapi setiap guru menilai sikap yang berbeda, sehingga nantinya semua sikap dapat dinilai. Selain itu juga dengan menggunakan bantuan komputer atau laptop yang sudah ada aplikasi penilaiannya, sehingga mempermudah guru melakukan penilaian dan juga melakukan diskusi/sharing dengan guru PPKn yang lain melalui forum MGMP.” (wawancara, 13 April 2015).

Bapak Samirun juga berpendapat:

“... Banyak lembar penilaian yang harus dikerjakan oleh guru. Misalnya saja pada penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, akan menyita tidak sedikit waktu. Ditambah lagi penilaian pengetahuan dan keterampilan yang membutuhkan waktu tidak sedikit. Untuk melakukan semua penilaian secara maksimal saya rasa sulit tetapi dengan bantuan media elektronik seperti laptop, komputer, media internet dapat meringankan beban kita dalam melakukan penilaian.” (wawancara, 10 April 2015).

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa solusi untuk mengatasi hambatan dalam penilaian adalah dengan menggunakan bantuan media elektronik seperti komputer, laptop, dan jaringan internet yang telah menyediakan aplikasi untuk mengolah berbagai aspek penilaian sehingga lebih cepat dan mudah. Selain itu juga dilakukan diskusi/sharing dengan guru PPKn dalam forum MGMP mengenai berbagai hal terkait dengan penerapan kurikulum 2013. Solusi yang lain adalah tidak semua penilaian dilakukan, khususnya penilaian sikap, hanya beberapa sikap saja yang dinilai tetapi setiap guru menilai sikap yang berbeda, sehingga nantinya semua sikap dapat dinilai.

Hambatan yang lain adalah memotivasi keaktifan siswa. Solusinya adalah dengan menggunakan berbagai

macam model pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran dan menumbuhkan sikap kritis dalam diri siswa tersebut. Ibu Maria Ulfah berpendapat bahwa:

“... Untuk menumbuhkan sikap aktif siswa itu kita dapat mengkalinya dengan menggunakan model pembelajaran yang mengharuskan siswa itu aktif, seperti model *Problem Based Learning*. Siswa diberikan sebuah kasus untuk mereka analisis dan menyampaikan hasil analisis kepada teman-teman yang lain. Mau tidak mau semua siswa harus aktif mengemukakan pendapat dan memberikan sanggahan atau pertanyaan terhadap pendapat teman yang lain.” (wawancara, 7 April 2015).

Jadi, dengan menggunakan beberapa model pembelajaran yang mengharuskan siswa aktif dapat menumbuh kembangkan sikap aktif siswa di kelas. Selain itu, dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat juga dapat mempermudah siswa untuk memahami materi.

Hambatan yang lain adalah sarana dan prasarana yang kurang lengkap. Menurut ibu Yayuk Karsiyah:

“... salah satu hambatan dalam menerapkan kurikulum 2013 disini adalah sarana dan prasarana yang kurang lengkap. Belum tersedianya Proyektor atau LCD, dan juga jaringan Internet yang belum mencakup ke ruang-ruang kelas. Serta belum terdistribusikannya buku paket revisi untuk siswa kelas 7. Cara mengatasi hal tersebut yaitu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang seadanya dan menggunakan dana pribadi dari pihak sekolah untuk membeli proyektor/LCD, serta menggunakan buku paket yang lama tetapi materinya masih tetap sama sambil menunggu ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap.” (wawancara, 14 April 2015).

Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan dana pribadi dari pihak sekolah untuk setidaknya melengkapi beberapa sarana dan prasarana pendukung pembelajaran. Dan juga memanfaatkan sarana dan prasarana pendukung yang ada. Serta menggunakan buku paket lama yang materinya sama.

Pembahasan

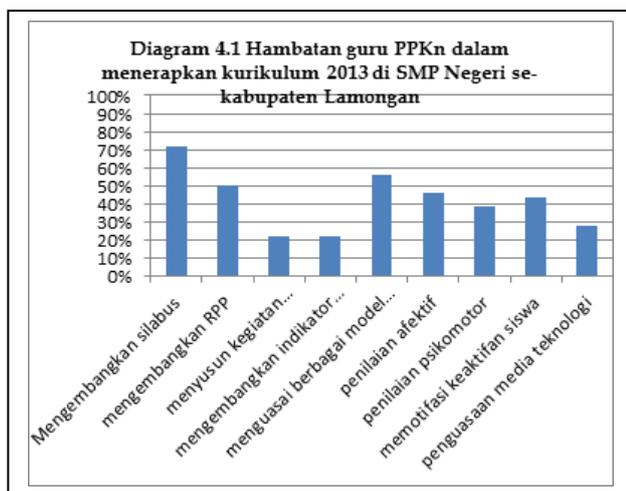
Sesuai dengan hasil penelitian tentang hambatan yang dihadapi guru PPKn dalam menerapkan kurikulum 2013 di SMP Negeri se- kabupaten Lamongan, dapat diketahui bahwa hambatan yang dihadapi antara lain adalah mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri,

menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, mengembangkan indikator pencapaian pada setiap KD, menguasai berbagai macam model pembelajaran, melakukan penilaian afektif dan psikomotor, memotifasi keaktifan siswa, sarana dan prasarana yang kurang lengkap, dan mengoperasikan media teknologi. Ada Empat faktor menurut George Edward III yang berperan penting dalam suatu implementasi, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya adalah:

Pertama faktor komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Komunikasi merupakan faktor penting dalam setiap kebijakan agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal ini kurang meratanya sosialisasi yang dilakukan kemendikbud kepada guru mengenai penerapan kurikulum 2013 mengakibatkan terjadinya hambatan pada penerapannya. Hanya beberapa guru saja yang mendapatkan sosialisasi dan yang lainnya hanya mendapatkan pendampingan dari guru yang telah mengikuti sosialisasi. Bapak Yulianto mengaku sosialisasi mengenai kurikulum 2013 sudah dilaksanakan beberapa kali, namun tidak semua guru yang mengikuti sosialisasi tersebut, sehingga masih banyak bapak ibu guru yang kurang memahami dengan baik kurikulum 2013.

Keberhasilan dalam penerapan kurikulum bergantung pada kemampuan seorang guru. Guru harus dapat memahami dan menguasai kurikulum secara utuh. Karena dengan demikian seorang guru dapat mengembangkan materi pembelajaran, mengembangkan strategi belajar mengajar, mengembangkan dan memilih media pembelajaran, dan melakukan evaluasi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Karena itulah sosialisasi mengenai kurikulum 2013 ini sangat penting untuk dilakukan agar guru dapat memahami dan menguasai kurikulum 2013 secara utuh.

Kedua, faktor Sumber Daya. Dalam menerapkan kurikulum 2013, ada beberapa sumber daya yang perlu diperhatikan yaitu sumber daya manusia dan fasilitas. Sumber daya manusia yaitu tenaga pendidik atau bapak ibu guru. Dari hasil data yang diperoleh, masih banyak guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan kurang memahami kurikulum 2013 dengan baik dan mengalami kesulitan atau hambatan dalam penerapannya, hal tersebut dikarenakan sosialisasi mengenai kurikulum 2013 yang kurang merata dan juga persiapan dari bapak/ ibu guru dalam menghadapi perubahan kurikulum masih kurang. Hambatan yang dihadapi secara rinci dipaparkan dalam diagram 4.1 berikut :



Dari diagram 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan mengalami hambatan dalam menerapkan kurikulum 2013. Misalnya saja pada perencanaan pembelajaran seperti membuat dan merancang silabus secara mandiri, 72,2% guru PPKn mengalami kesulitan. Dan untuk membuat RPP secara mandiri sebanyak 50% guru PPKn mengalami kesulitan. Pemahaman mengenai berbagai model pembelajaran juga masih kurang, terbukti dengan 55,6% guru PPKn kesulitan untuk menentukan model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran. Selain itu juga guru PPKn mengalami hambatan pada menyusun kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah sebanyak 22,2% guru, mengembangkan indikator pencapaian pada setiap KD sebanyak 22,2% guru, melakukan penilaian afektif sebanyak 45,8% guru, melakukan penilaian psikomotor sebanyak 38,9% guru, memotifasi keaktifan siswa 44,4% guru, dan mengoperasikan media teknologi sebanyak 27,8% guru.

Sumber daya yang kedua adalah fasilitas. Fasilitas atau sarana prasarana seperti buku paket, media elektronik, meja, bangku, ruang kelas, perpustakaan, dan peralatan lain penunjang kegiatan pembelajaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan data yang diperoleh, sarana dan prasarana antar SMP Negeri yang menjadi *Pilot Project* pengembangan kurikulum berbeda satu sama lain. SMP yang berada di daerah kota memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sehingga membantu dalam proses pembelajaran dan juga dapat terlaksana dengan baik kurikulum 2013. Terdapat pula SMP yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang lengkap, khususnya SMP yang terdapat di pelosok desa, sehingga untuk menerapkan kurikulum 2013 terdapat hambatan.

Ketiga, faktor disposisi. Disposisi adalah karakteristik penting dari pelaksana kebijakan. Karakter penting yang harus dimiliki misalnya kejujuran, komitmen atau

tanggung jawab dari pelaksana program tersebut. Guru memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kurikulum 2013 sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Tanggung jawab tersebut dilakukan oleh guru PPKn dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 meliputi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *Scientific* dan penilaian autentik. Meskipun beberapa guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan mengalami berbagai macam hambatan dalam menerapkan kurikulum 2013. Mereka tetap berusaha dan bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum 2013 dengan kemampuan yang mereka miliki.

Keempat, struktur birokrasi. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. mekanisme implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat pedoman. Pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Dalam hal ini guru PPKn yang mengajar di SMP Negeri se-kabupaten Lamongan berpedoman pada permendikbud no 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, dapat diketahui bahwa faktor penghambat dalam penerapan kurikulum 2013 di antaranya adalah faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor disposisi, dan faktor struktur birokrasi. Faktor komunikasi yang menghambat dalam penerapan kurikulum 2013 ini adalah kurang meratanya sosialisasi mengenai penerapan kurikulum 2013 kepada bapak ibu guru, sehingga mereka kurang memahami dengan baik konsep dan tujuan dari pada penerapan kurikulum tersebut. Faktor sumber daya mencakup sumber daya manusia dan fasilitas. Sumber daya manusia yang menghambat dalam penerapan kurikulum 2013 adalah kemampuan guru dalam memahami dan menguasai kurikulum 2013 masih kurang baik misalnya dalam mengembangkan silabus dan RPP secara mandiri, menggunakan pendekatan ilmiah, mengembangkan indikator pencapaian pada setiap KD, menguasai berbagai macam model pembelajaran, dan melakukan penilaian afektif dan psikomotor. Selain itu, fasilitas penunjang kegiatan pembelajaran yang masih kurang lengkap seperti belum terdistribusikannya buku paket PPKn untuk kelas 7, jaringan internet yang belum mencakup seluruh kelas, serta minimnya media teknologi seperti proyektor dan komputer. Faktor disposisi yakni karakteristik guru yang kurang bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam menerapkan kurikulum 2013. Faktor birokrasi, guru

kurang memperhatikan pedoman pelaksanaan kurikulum 2013.

Upaya yang dilakukan guru PPKn dalam mengatasi hambatan penerapan kurikulum 2013 di SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan meliputi: 1)Melakukan diskusi/sharing dengan guru PPKn dalam forum MGMP, 2)Memanfaatkan silabus yang sudah dibuat oleh kemendikbud, 3)Mengikuti seminar/ lokakarya mengenai kurikulum 2013, 4)Memahami dan menguasai betul beberapa model pembelajaran, 5)Menggunakan bantuan media elektronik, 6)Menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang memudahkan siswa untuk memahami suatu materi pembelajaran dan menumbuhkan sikap kritis dalam diri siswa tersebut.

Saran

Dengan adanya perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013, seharusnya perlu dilakukan persiapan yang matang terlebih dahulu sebelum menerapkannya, baik itu mempersiapkan tenaga kependidikan maupun mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang keberhasilan penerapan kurikulum 2013.

Guru harus mempersiapkan diri dan tanggap terhadap perubahan kurikulum dengan meningkatkan wawasan, kreatifitas, dan pemahaman melalui kegiatan yang terkait dengan kurikulum yang baru seperti seminar, workshop, atau mempelajari tentang buku-buku terkait dengan kurikulum tersebut sehingga penerapan kurikulum baru dapat berjalan dengan maksimal.

Pemerintah terutama dinas pendidikan kota Lamongan perlu memberikan sosialisasi kurikulum 2013 secara merata pada setiap sekolah untuk memperlancar penerapan kurikulum 2013 tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan bimbingan kepada tiap sekolah yang menjadi *Pilot Project* pengembangan kurikulum 2013. Karena dengan adanya pembimbing, guru bisa berkonsultasi langsung bila mengalami kesulitan dalam pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA.

- Hamalik, Oemar. 2002. *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinarbaru Algesindo.
- Kemendikbud. 2013. *Diklat Guru Dalam Rangka Implementasi Kurikulum 2013*. Kemendikbud. [Modul]
- Kurinasih, Imas & Sani, Berlin. 2014. *Implementasi Kurikulum 2013 (Konsep dan Penerapan)*. Surabaya: Kata Pena.
- Loeloek E P. 2013. *Panduan Memahami Kurikulum 2013*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.

Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mulyasa. E. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nasution. 2009. *Metode Research*. Bandung: Jemmars.

Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Republik Indonesia No.14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.